

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumusan kebijakan program pendidikan rakyat ( PRODIRA ) bagi SMA dan sederajat oleh pemerintah Provinsi Gorontalo sangat bagus sekali, akan tetapi pada saat implementasi kebijakan masih terdapat atau masih mengalami beberapa hambatan yang di temukan dilapangan di antaranya dalam proses penganggaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan oprasional sekolah, sementara alokasi dana yang di kucurkan untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah yaitu Rp. 83.000, untuk SMA sedangkan untuk SMK Rp. 100.000 ,- untuk setiap siswa per bulan. Alokasi dana tersebut sangat minim, alokasi dana Prodira untuk opsional sekolah sebesar Rp.1.000,000, untuk SMA persiswa dalam Satu tahun, sedangkan untuk SMK sebesar Rp. 1.200.000 persiswa pertahun, sebagaimana yang kami terima tersebut kami rasa masih sangat minim dan belum mengakomodir kebutuhan siswa.
2. Implementasi kebijan program pendidikan rakyat ( Prodira ) bagi SMA dan sederajat oleh pemerintah Provinsi Gorontalo belum bisa di implementasikan dengan baik, diantar terjadi di sekola SMK 3 Kota Gorontalo kalau dirinci dana yang dibutuhkan oleh sekolah pada pos ekstra saja kami sudah kewalahan misalnya membeli peralatan olah raga,

perlengkapan pramuka, PMR dan kebutuahn pelatihan kesenian semua tidak mencukupi. Di samping itu siswa kami di sekolah ini memiliki progra Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) yang belum dialokasikan dalam Prodira sehingga terpaksa setiap kegiatan PKL dibiayai sendiri oleh siswa mencapai jutaan rupiah, sementara itu pada saat penerimaan siswa baru kami harus memungut biaya pada setiap siswa baru dengan jumlah Rp. 2.000,000 persiswa, dalam bentuk sumbangan awal tahun ( SAT ), itu pun diluar pungutan komite perbulan sebesar Rp. 100.000, sementara itu masih bayak kebutuhan siswa yang belum terpenuhi misalnya : dana praktek industri untuk kelas X dan XI pertahun sebesar Rp. 500.000 pertahun dan dana untuk penambahan jam pelajaran untuk kelas XII Rp. 500.000”

Penyaluran dana bagi sekolah dengan membuat proposal permohonan dianggap mubajir oleh beberapa sekolah penerima Prodira. Kepala sekolah datang bolak-balik ke Provinsi dengan membawa tiga bundel proposal yang berisi rincian anggaran dana. Implementasi pencairan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah langsung ke Bank tanpa ada potongan-potongan. Hal ini telah sesuai dengan rumusan kebijakan yang ada. Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam hal ini seperti Kepala sekolah yang berhalangan masuk atau keluar kota.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Prodira di Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membuat satu kebijakan dalam hal ini kebijakan program pendidikan rakyat (prodira), lebih memperhatikan permasalahan yang ada di sekolah.
- b. Disarankan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo agar supaya dalam penetapan biaya oprasional sekolah lebih ditingkatkan lagi atau disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap sekolah yang menerima dana prodira.
- c. Dalam merumuskan suatu kebijakan bukan hanya melibatkan birokrasi pemerintahan yang tertentu, akan tetapi di libatkan seluruh instasi terkait misalnya: para pakar pendidikan, Kepala sekolah, dan elemen masyarakat,
- d. Disarankan kepada Tim Manajemen dapat mendatangi langsung sekolah dalam penjemputan data-data melalui dinas Kabupaten/Kota setempat.
- e. Penerimaan dana Prodira disarankan bukan saja dilakukan oleh kepala sekolah tetapi dapat pula dilakukan oleh Bendahara Sekolah.
- f. Dalam penelitian ini peneliti sadari bahawa masih terdapat beberapa penomena yang menarik dalam Skripsi ini, oleh sebab itu untuk lebih mengarah kesempurnaan penyusunan Skripsi ini akan dilanjutkan pada penelitian yang lain nanti, agar kiranya bisa melahirkan suatu kebijakan yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Anggoro, Toha. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Universitas Terbuka
- Anonim. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Gorontalo:Universitas Negeri Gorontalo.
- Budi Winarno, MA, PhD. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada
- Danim. Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung:Pustaka Setia
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Greston, 2002. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Gramedia
- Hernowo. 2002. *Paradigma Pendidikan di Indonesia*. Bandung:Khaifa
- Kaelan. MS. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan PT*. Yogyakarta:Paradigma
- Puluhulawa Jusdin, 2012. *Sistim Intensif Berbasis Kinerja Dalam Birokrasi ( Studi Kasus Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Provinsi Gorontalo*. Desertasi Universitas Brawijaya Malang.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suparlan. 2004. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Willam N .Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press

Wahyudin, Din, 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Univesitas Terbuka

Wibawa, Basuki.2003. *Manajemen Penelitian* . Jakarta: Pustaka Jaya

Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta:Palanta

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasiona

<http://kungngayau.blogspot.com/2013/02/sikluas-dan-model-kebijakan-publik.html#xzz2jm1Jc4k5>.